

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor

Riska Yuliani¹, Denny Hernawan², Faisal Tri Ramdani³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor Jl Tol Ciawi No 1 16720

Korespondensi: Denny Hernawan. Email: denny.hernawan@unida.ac.id

Abstrak

Penelitian bermaksud guna mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan bagi warga yang termasuk kedalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan. Program yang diharapkan mampu meringankan biaya kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi warga penerima bantuan dan juga bisa sedikitnya membantu mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Bogor Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan cara tanya jawab dan pengamatan langsung. Sedangkan metode dalam penelitian menggunakan metode deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan jawaban atau respon dari para responden. Informan diambil sebanyak 5 orang, 2 orang penerima langsung bantuan Program Keluarga Harapan, peserta aktif yang lama dan yang baru menerima bantuan, 1 orang Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Cipaku, 1 orang Ketua RW dan 1 orang lagi merupakan pendamping yang aktif dalam program ini. Adapun hasil penelitian disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berlangsung cukup baik dan bisa membantu warga yang menerima bantuan dari program ini, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak warga yang menyalahgunakan kebijakan dari program ini. Diperlukan sosialisasi kembali kepada sasaran program, untuk menggunakan dana PKH ke hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu diperlukan juga pengawasan dari Pendamping Program agar dana yang diterima masyarakat bisa digunakan sesuai dengan tujuan program ini. Diharapkan pula PKH ini tetap berjalan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Program, Keluarga Harapan

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesias hingga saat ini masih menjadi isu yang cukup serius. Pemerintah Indonesia masih berusaha menurunkan angka kemiskinan di Negara ini. Setelah merebaknya pandemi covid-19 di seluruh Negara di dunia. Dilansir dari *BBC News Indonesia*, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) akibat pandemi ini angka kemiskinan di Indonesia melonjak menjadi lebih dari 2,7 juta jiwa. Hal ini membuktikan bahwa kemiskinan masih jadi sebuah tantangan yang besar dan harus dihadapi oleh berbagai bangsa. Kemiskinan harus dijadikan sebagai sebuah prioritas oleh pemerintah dan harus segera dituntaskan.

Berbagai program sudah dijalankan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Terutama pasca pandemi covid-19, pemerintah terus menggelontorkan berbagai macam bantuan. Bantuan pemerintah sangat diperlukan oleh banyak warga tidak mampu. Berbagai program bantuan untuk mengatasi kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah, salah satu program yang dirancang oleh pemerintah yaitu PKH. Program Keluarga Harapan merupakan

program pengentasan kemiskinan yang bersifat memberikan bantuan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat (Adisanjaya Sulaeman, 2016). Selain itu, Program ini dibentuk untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga yang masuk kedalam RTSM. Padahal, tujuan PKH secara keseluruhan adalah untuk meningkatkan ketersediaan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial untuk mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban biaya keluarga miskin dalam jangka pendek dan memutus mata rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Karena meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, pendidikan dan pemeliharaan sumber daya sosial menawarkan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. (Adisanjaya Sulaeman, 2016). Harapannya dengan ada bantuan ini, warga yang termasuk ke dalam penerima bantuan, bisa terbantu biaya pendidikan dan kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan dan mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan.

II. METODOLOGI

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berisi uraian yang menggambarkan jawaban atau respon dari para responden. Sedangkan teknik dalam pengumpulan data melalui kuisioner pertanyaan, tanya jawab dan observasi langsung. informan diambil sebanyak 5 orang, 2 orang penerima langsung bantuan PKH, informan 1 yaitu peserta aktif yang sudah lama menerima bantuan dan informan 2 peserta aktif yang baru menerima bantuan PKH, informan 3 yaitu pendamping yang aktif dalam program ini, informan 4 yaitu Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Cipaku dan informan 5 yaitu Ketua RW 06 Kelurahan Cipaku.

III. HASIL DAN DISKUSI

1. Implementasi Kebijakan PKH di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

Implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan, peneliti melakukan analisis sesuai hasil wawancara dengan informan dan observasi langsung perihal PKH di Kelurahan Cipaku. Wawancara dilakukan seputar pelaksanaan PKH, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut sesuai teori yang digunakan menurut Weimer dan Vining dalam Subarsono (Mellani, 2022), yaitu dengan 3 faktor variabel yang sesuai dengan konsep pelaksanaannya, yakni: Logika Kebijakan, Lingkungan Tempat Kebijakan dioperasionalkan dan Kemampuan Implementor Kebijakan.

1) Logika Kebijakan

Logika yang diusulkan merupakan bentuk membuat program guna memecahkan masalah masyarakat. Saat memecahkan masalah, program harus rasional dan memiliki dukungan teoretis.

a. Kesesuaian Tujuan Program

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan diperlukan kesesuaian penggunaan tujuan program. Agar kebijakan mencapai keberhasilan dan mencapai tujuannya diperlukan aturan yang sesuai dan masyarakat mampu mengikuti aturan tersebut. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan PKH maka dana bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus dipergunakan untuk kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan wawancara dan observasi langsung, menurut Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Cipaku, beliau mengatakan bahwa dana dari PKH ini **belum** dipergunakan sesuai dengan aturan. Penerima bantuan terkadang abai terhadap tujuan penggunaan dana program ini. Beberapa KPM menggunakan dana sesuai dengan tujuan PKH, namun tak sedikit yang menggunakan dana program ini untuk hal lain. Salah satunya, KPM yang sudah lama menerima bantuan PKH ini, seringkali dana PKH digunakan untuk modal usaha warung. Tentu saja, pemanfaatan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari PKH.

Maka dengan ini, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan penggunaan dana bantuan dari PKH belum dilaksanakan dengan baik. Kurangnya kesadaran penerima bantuan program ini untuk menggunakan dana untuk pendidikan dan kesehatan.

b. Ketepatan sasaran

Sasaran yang dimaksud adalah masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan PKH di kelurahan Cipaku, yang kemudian didukung dengan beberapa syarat tertentu. Syarat yang dimaksud kepesertaan PKH adalah memenuhi tiga komponen yaitu: komponen kesehatan yang meliputi adanya Ibu Hamil, Mempunyai anak balita dan Anak Usia Sekolah. Komponen kedua yaitu Komponen pendidikan yakni memiliki anak yang bersekolah di SD, SMP, dan SMA. Komponen ketiga yakni Komponen kesejahteraan sosial yakni memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas berat, dan memiliki anggota keluarga lanjut usia yang berusia 60 tahun keatas (Beni, 2020). Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Pendamping Program, beliau mengatakan bahwa warga yang menjadi penerima manfaat program ini **telah sesuai dengan kriteria** yang ditetapkan. Hal ini diperjelas dengan keterangan Ketua RW 06 Kelurahan Cipaku. Ketua RW tersebut mengatakan bahwa untuk wilayah RW 06 penerima bantuan PKH ini telah tepat sasaran yakni ditujukan kepada masyarakat yang termasuk ke dalam rumah tangga sangat miskin. Namun beliau sendiri sempat mendengar satu isu yang mengatakan akan adanya pengurangan KPM (keluarga penerima manfaat) dari program ini. KPM yang akan dikurangi merupakan KPM yang sudah mampu dari segi ekonomi. Namun meskipun begitu, akan ada penambahan KPM yang baru untuk keluarga yang lebih membutuhkan.

Berdasarkan aspek ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa ketepatan sasaran dalam program ini masuk kedalam kategori yang baik.

c. Kejelasan Teknis

Dilaksanakan sesuai prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat perlakuan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan

pendapatan. Mulai November, pembayaran penyaluran bantuan teknis dari program bantuan dari PKH, akan dilakukan secara tunai di bulan november 2022 bisa diambil di kantor pos/ kantor kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan salah satu KPM, kejelasan teknis dari program ini sudah cukup jelas. KPM hanya tinggal antri dan mengikuti prosedur teknis yang mudah.

Maka dengan ini peneliti mengambil kesimpulan kejelasan teknis dari program ini sudah cukup baik dilaksanakan karena para KPM tidak merasa kesulitan dalam menjalankan tejnis dari program ini.

2) Lingkungan tempat kebijakan di operasionalkan

Lingkungan kebijakan adalah lokasi dimana kebijakan itu dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan difokuskan dari sejauh mana lingkungan kebijakan mampu mengikuti kebijakan yang berlaku.

a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial disini diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Cipaku dapat dikategorikan belum sejahtera dan perlu dibantu oleh pihak pemerintah. Kondisi kesejahteraan masyarakat ini juga sekaligus menjadi pedoman untuk menentukan penerima bantuan program ini.

Berdasarkan observasi langsung ke lapangan, kondisi sosial beberapa RW di Kelurahan Cipaku termasuk kedalam kondisi sosial yang belum sejahtera dan pantas untuk mendapatkan bantuan PKH ini.

b. Kondisi Ekonomi

Pelaksanaan PKH memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masuk kedalam rumah tangga sangat miskin. Kondisi ekonomi masyarakat penerima PKH ini mayoritas bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan dibawah 2 juta rupiah setiap bulan.

Berdasarkan observasi langsung serta wawancara yang dilakukan kepada informan yang termasuk kedalam anggota KPM program ini, mereka mengatakan bahwa sangat terbantu dengan adanya bantuan program ini.

Dalam hal ini, penulis memberikan kesimpulan bahwa Program Keluarga Harapan sudah cukup membantu masyarakat dengan kondisi ekonomi yang termasuk ke dalam rumah tangga yang sangat miskin.

c. Kondisi Geografis/Fisik

Kelurahan Cipaku merupakan kelurahan yang ada di Kecamatan Bogor Selatan. Kelurahan ini memiliki luas \pm 174. Ha, memiliki 18 RW dan 61 RT. Berdasarkan hasil observasi lapangan, pelaksanaan PKH ini, kondisi geografis di Kelurahan Cipaku termasuk ke dalam kondisi yang tidak mendukung dalam pelaksanaan program ini. Hal ini dikarenakan jarak setiap RW yang cukup jauh dan kontur jalan yang memiliki banyak tanjakan dan turunan yang agak sulit untuk dilewati.

3) Kemampuan Implementor Kebijakan

Berhasilnya Implementasi kebijakan program dapat dipengaruhi oleh tingkat keterampilan dan keahlian pelaksana kebijakan. Pengetahuan dan keterampilan

diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan atau melakukan tugas seperti yang diharapkan dalam kebijakan. Dalam hal ini, kemampuan eksekutor dilihat dari dua sudut pandang :

a. Keterampilan Implementor

Keterampilan implementor adalah suatu keharusan dalam menjalankan sebuah kebijakan pada program PKH. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada informan yaitu Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Cipaku, informan mengatakan bahwa keterampilan implementor **sudah cukup baik** dalam menjalankan PKH di Kelurahan Cipaku. Hal ini juga didukung oleh informan lain yaitu Ketua RW 06, informan tersebut mengatakan juga bahwa implementor yang bertugas di Kelurahan Cipaku memiliki keterampilan yang cukup baik.

b. Kompetensi Implementor

Kompetensi merupakan hal penting dan harus dimiliki oleh implementor dalam melaksanakan kebijakan sebuah program. Hal ini didukung dengan pengetahuan yang dimiliki dan profesionalisme dalam bekerja untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara, kompetensi dari implementor masih belum optimal, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian implementor dalam mengawasi dan monitoring KPM dikarenakan jarak wilayah dengan tempat tinggal pendamping cukup jauh.

2. Faktor penghambat dan upaya yang telah dilaksanakan dalam mengatasi hambatan

a. Faktor Penghambat

Berdasarkan temuan di lapangan, faktor penghambat dari implementasi Kebijakan PKH ini yaitu kurangnya pengawasan terhadap KPM mengenai kebijakan penggunaan dana PKH ini. Masih banyak KPM yang tidak menggunakan dana bantuan PKH untuk keperluan pendidikan dan kesehatan tetapi menggunakannya untuk hal yang lain. Selain itu, kondisi geografis di Kelurahan Cipaku juga menjadi faktor penghambat bagi berjalannya program ini. Dengan kondisi geografis setiap RW yang jaraknya cukup jauh dan kontur jalan yang memiliki banyak tanjakan dan turunan yang agak sulit untuk dilewati.

b. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan.

Berdasarkan faktor penghambat yang ditemui, maka upaya yang telah dilakukan, diantaranya:

- Memberikan sosialisasi kembali kepada KPM mengenai tujuan diadakannya program PKH ini dan kemana seharusnya dana bantuan digunakan. Dana bantuan digunakan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan.
- Penjadwalan monitoring setiap bulan, dan berkomunikasi aktif dengan pendamping PKH di setiap lingkungan RT.

IV. KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Cipaku telah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari 3 indikator yaitu Logika Kebijakan, Lingkungan Tempat Kebijakan dioperasionalkan dan Kemampuan Implementor Kebijakan. Pada Indikator logika kebijakan implemntasi PKH dinilai masih kurang baik, terutama pada aspek kesesuaian

tujuan program masih banyak KPM yang belum memanfaatkan bantuan PKH untuk pendidikan dan kesehatan.

Kemudian pada indikator lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan, indikator ini dapat dinilai cukup baik karena di Kelurahan Cipaku ini memiliki banyak warga tidak mampu yang memang seharusnya diberikan bantuan. Meskipun kondisi geografis di kelurahan Cipaku terbilang tidak mendukung karena jarak setiap RW yang berjauhan serta banyak tanjakan dan turunan yang curam. Terakhir, pada indikator keterampilan implementor program, indikator ini dapat dinilai cukup baik, meskipun kurang dalam memonitoring KPM namun secara keterampilan, implementor program PKH ini sudah sangat terampil dalam menjalankan tugasnya.

2. Diperlukan sosialisasi kembali kepada para KPM baik KPM yang baru mendapatkan penerima bantuan maupun yang sudah lama dalam menggunakan dana bantuan PKH dengan baik. Dan juga peningkatan pelaksanaan monitoring untuk para implementor agar kebijakan dari PKH ini sesuai dengan tujuan utama dari program.

REFERENSI

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Beni, S. dan B. M. (2020). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERBATASAN (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat). *RESEARCHGATE SOSIO KONSEPSIA*, 9, 162–170. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1832>
- Fitria, R., Ifansyah, M. N., & Firdaus, M. Y. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DILIHAT DARI ASPEK SUMBER DAYA (Studi Kasus Di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong). *JAPB*, 3(2), 545-558.
- Khasanah, N. (2018). Pengaruh Sumber Daya Dan Disposisi Pelaksana Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *JMAN jurnal mahasiswa Administrasi negara*, 2(2), 30-35.
- Kholif, K. I. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Matualage, P. (2015). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kota Manado (Studi Kasus di Kecamatan Tuminting. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1049
- Mellani, W. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko. In <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/10822>.

- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Permatasari, I. A. (2020). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Rachmawati, T. (2017). *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. UNPAR Press. Bandung.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.
- Rafiudin, M., Agustino, L., & Haris, D. M. (2016). *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)*.
- Suharyo, A., & Khomariyati, S. (2020). *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG*. *e-JKPP*, 6(2).
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 88-92.
- Syahputra Adisanjaya, S., & Resnawati, R. (2017). *Program Keluarga Harapan (PKH): antara Perlindungan Sosial daan Pengetasan Kemiskinan*. *Prosiding KS: Riset da PKM*, 4(1), 1-140.
- Zahra, A. F. (2021). *Implementasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)*.